

INOVASI KEUANGAN SOSIAL ISLAM UNTUK KETAHANAN EKONOMI DI PROVINSI BENGKULU

ISLAMIC SOCIAL FINANCE INNOVATIONS FOR ECONOMIC RESILIENCE IN BENGKULU PROVINCE

Fiona Hasdo Putri¹, M. Wahyu Alqadri¹

¹Ekonomi Dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati
Sukarno Bengkulu

Email korespondensi: fionahasdoputri@gmail.com

Abstract

This research explores the role of Islamic social finance innovations in strengthening economic resilience in Bengkulu. Utilizing data from the National Socioeconomic Survey (SUSENAS), the study highlights the potential of zakat, waqf, and Islamic microfinance as tools for sustainable economic development. Key findings reveal that despite a reduction in the poverty rate from 15.22% in 2021 to 14.62% in 2022, disparities remain across districts. Optimizing Islamic social finance is critical to bridging economic inequality and improving community welfare. Challenges include limited public awareness and institutional inefficiencies. This study concludes with recommendations for digitalization, institutional strengthening, and stakeholder collaboration to maximize the benefits of Islamic social finance innovations. The results of the study stated that Islamic social finance is a powerful tool for economic transformation, its successful implementation in Bengkulu requires a comprehensive and multi-faceted approach that includes effective management, public engagement, a strong institutional framework, and local collaboration. If these elements are adequately addressed, Islamic social finance can play a transformative role in reducing poverty, bridging economic disparities, and promoting sustainable community development in Bengkulu.

Keywords: Islamic finance, Economic Resilience, Zakat, Waqf, Microfinance

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi peran inovasi keuangan sosial syariah dalam memperkuat ketahanan perekonomian di Bengkulu. Dengan memanfaatkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), studi ini menyoroti potensi zakat, wakaf, dan keuangan mikro syariah sebagai alat untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Temuan-temuan utama menunjukkan bahwa meskipun tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 15,22% pada tahun 2021 menjadi 14,62% pada tahun 2022, kesenjangan masih terjadi antar kabupaten. Optimalisasi keuangan sosial Islam sangat penting untuk menjembatani kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tantangannya mencakup terbatasnya kesadaran masyarakat dan inefisiensi kelembagaan. Kajian ini diakhiri dengan rekomendasi digitalisasi, penguatan kelembagaan, dan kolaborasi pemangku kepentingan untuk memaksimalkan manfaat inovasi keuangan sosial Islam. Hasil penelitian menyatakan bahwa keuangan sosial Islam merupakan alat yang ampuh untuk transformasi ekonomi, keberhasilan penerapannya di Bengkulu memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multi-aspek yang mencakup manajemen yang efektif, keterlibatan publik, kerangka kelembagaan yang kuat, dan kolaborasi lokal. Jika elemen-elemen ini ditangani secara memadai, keuangan sosial Islam dapat memainkan peran transformatif dalam mengurangi kemiskinan, menjembatani kesenjangan ekonomi, dan mendorong pembangunan masyarakat berkelanjutan di Bengkulu.

Kata kunci: Keuangan Syariah, Ketahanan Ekonomi, Zakat, Wakaf, Keuangan Mikro.



CC Attribution-ShareAlike 4.0

Copyright © 2024 Author

Diterima: 18 November 2024; Disetujui: 24 November-2024; Terbit: 29 November 2024

PENDAHULUAN

Tantangan perekonomian yang dihadapi Provinsi Bengkulu antara lain tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi antar wilayah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan meskipun angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu menurun dari 15,22% pada Maret 2021 menjadi 14,62% pada September 2022, namun kabupaten seperti Seluma dan Kaur masih mencatatkan persentase kemiskinan di atas 18%. Sebaliknya Kabupaten Bengkulu Tengah mencatat angka kemiskinan terendah yaitu 9,76% pada tahun 2022 (Gustang, 2020).

Dalam konteks ini, keuangan sosial Islam seperti zakat, wakaf, dan keuangan mikro dapat menjadi solusi strategis. Potensi redistribusi kekayaan melalui zakat produktif, pengembangan infrastruktur sosial berbasis wakaf, dan akses modal usaha mikro berbasis syariah memberikan peluang untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Namun implementasi keuangan sosial syariah di Bengkulu masih menghadapi tantangan berupa minimnya kesadaran masyarakat, belum terintegrasinya data mustahik, dan inefisiensi kelembagaan (Yetty et al., 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi keuangan sosial syariah dan dampaknya terhadap ketahanan ekonomi masyarakat di Bengkulu, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan ekonomi (Sulistyaningsih & Ivan, 2021).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Literatur: Menelaah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dari BPS, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian terkait keuangan sosial syariah. Studi literatur dalam penelitian ini melibatkan kajian komprehensif terhadap berbagai sumber data, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dari BPS, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian terkait keuangan sosial syariah. SUSENAS memberikan wawasan berharga mengenai kondisi sosio-ekonomi di Bengkulu, termasuk tingkat kemiskinan, distribusi pendapatan, dan akses terhadap kebutuhan

dasar. layanan, yang penting untuk memahami konteks regional. Selain itu, peninjauan jurnal ilmiah dan laporan penelitian memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana mekanisme keuangan sosial Islam, seperti zakat, wakaf, dan keuangan mikro, telah diterapkan di wilayah atau negara lain dan dampaknya terhadap ketahanan ekonomi. Dengan menganalisis sumber-sumber tersebut, penelitian dapat mengidentifikasi praktik terbaik, tantangan yang ada, dan peluang untuk mengoptimalkan penggunaan keuangan sosial Islam dalam meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat di Bengkulu.

2. Wawancara: Melibatkan pemangku kepentingan seperti pengelola lembaga zakat dan wakaf serta penerima manfaat di berbagai kabupaten di Bengkulu. Proses wawancara melibatkan pemangku kepentingan utama, termasuk pengelola lembaga zakat dan wakaf, serta penerima manfaat dari berbagai kabupaten di Bengkulu, untuk mendapatkan wawasan langsung mengenai tantangan dan peluang seputar keuangan sosial Islam di wilayah tersebut. Wawancara dengan pengelola zakat dan wakaf akan memberikan perspektif berharga mengenai permasalahan operasional yang mereka hadapi, seperti alokasi sumber daya, integrasi data, dan koordinasi kelembagaan. Di sisi lain, wawancara dengan penerima manfaat akan menyoroti dampak praktis inisiatif zakat dan wakaf terhadap kehidupan mereka, mengungkap keberhasilan dan area yang perlu ditingkatkan. Data kualitatif ini akan melengkapi studi literatur, menawarkan pemahaman komprehensif tentang konteks lokal dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas keuangan sosial Islam di Bengkulu.
3. Analisis Data Sekunder: Memanfaatkan data kemiskinan dari BPS untuk mengidentifikasi kesenjangan antar wilayah dan hubungannya dengan potensi keuangan sosial syariah. Analisis data sekunder akan fokus pada pemanfaatan data kemiskinan dari BPS untuk mengidentifikasi kesenjangan regional di Bengkulu dan menilai bagaimana kesenjangan tersebut berkorelasi dengan potensi dampak mekanisme keuangan

sosial Islam seperti zakat, wakaf, dan keuangan mikro. Dengan mengkaji tingkat kemiskinan dan indikator sosio-ekonomi lainnya di berbagai kabupaten, analisis ini akan membantu menentukan daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan dan kesenjangan ekonomi tertinggi, dimana keuangan sosial Islam dapat memberikan manfaat yang paling besar. Pendekatan ini juga akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana alat-alat keuangan ini dapat menjawab kebutuhan spesifik masyarakat yang kurang terlayani dan berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan kemiskinan, memberikan bukti yang mendukung intervensi yang ditargetkan di daerah-daerah yang paling membutuhkan bantuan ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data SUSENAS, angka kemiskinan di Bengkulu menurun dari 15,22% pada tahun 2021 menjadi 14,62% pada tahun 2022. Namun terdapat variasi yang signifikan antar wilayah:

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2021 dan 2022

Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan (Rp/ahap/bulan)				Jumlah Penduduk Miskin (ribu)				Pis
	Maret		September		Maret		September		
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	
Bengkulu Selatan	408.804	438.965	—	—	31,45	31,83	—	—	18,14
Rejang Lebong	487.490	530.029	—	—	43,3	43,18	—	—	15,85
Bengkulu Utara	398.746	423.857	—	—	35,55	35,51	—	—	11,61
Kaur	350.794	371.660	—	—	22,99	22,57	—	—	18,62
Seluma	414.446	444.231	—	—	27,05	26,71	—	—	16,72
Mukomuko	464.473	494.426	—	—	21,5	21,81	—	—	13,93
Labeng	440.127	472.738	—	—	12,97	14,14	—	—	12
Kepahiang	410.569	433.660	—	—	20,94	20,73	—	—	14,83
Bengkulu Tengah	447.435	512.084	—	—	11,12	11,33	—	—	9,48
Kota Bengkulu	740.612	785.205	—	—	66,94	59,43	—	—	17,89
Provinsi Bengkulu	548.934	590.754	—	—	306	297,23	—	—	35,22

Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey

Sumber: BPS, SUSENAS 2021–2022

Peran Keuangan Sosial Islam

1. Zakat Produktif:

Zakat produktif berhasil meningkatkan pendapatan penerima manfaat. Namun proses pendistribusiannya masih terkendala karena belum terintegrasinya data mustahik.

Data mustahik yang tidak terintegrasi menghadirkan tantangan besar dalam efektivitas distribusi zakat produktif, karena menghambat identifikasi akurat penerima yang berhak. Tanpa basis data yang terpusat dan terkini, terdapat risiko dana zakat salah dialokasikan atau menjangkau individu yang tidak memenuhi kriteria bantuan, sehingga melemahkan dampak yang diharapkan.

Selain itu, kurangnya integrasi antara berbagai lembaga zakat dan database pemerintah daerah memperburuk masalah ini, sehingga menyebabkan inefisiensi dalam menargetkan kelompok penerima zakat yang terbanyak merupakan kelompok rentan. Untuk mengatasi tantangan ini, penting untuk membangun sistem yang terpadu dan mudah diakses yang melacak profil mustahik secara akurat, memastikan bahwa dana zakat didistribusikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan memaksimalkan potensi pengentasan kemiskinan (Adinugraha et al., 2023).

2. Wakaf Tunai:

Wakaf tunai telah digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur sosial, seperti sekolah dan fasilitas kesehatan. Namun, kurangnya promosi menghambat realisasi potensi wakaf secara optimal. Kurangnya promosi dan kesadaran mengenai wakaf tunai telah membatasi potensi wakaf uang untuk mendorong pembangunan infrastruktur sosial di Bengkulu. Meskipun wakaf mempunyai kemampuan untuk mendanai proyek-proyek penting seperti sekolah dan fasilitas kesehatan, masih banyak individu dan organisasi yang tidak menyadari bagaimana mereka dapat berkontribusi atau mendapatkan manfaat dari wakaf.

Kesenjangan pengetahuan ini mengurangi partisipasi dan investasi dalam wakaf, sehingga mencegah wakaf mencapai kapasitas penuhnya sebagai alat pengembangan masyarakat jangka panjang. Untuk mengoptimalkan dampak wakaf uang, penting untuk menerapkan kampanye kesadaran yang ditargetkan, mengedukasi masyarakat mengenai manfaatnya, dan mempromosikan contoh keberhasilan proyek yang didanai wakaf. Dengan visibilitas dan pemahaman yang lebih baik, wakaf uang dapat memainkan peran transformatif dalam meningkatkan pelayanan publik dan mengatasi kesenjangan regional di Bengkulu (Maulida et al., 2020).

3. Keuangan Mikro Islam:

Keuangan mikro berbasis syariah mendukung pemilik usaha kecil di Bengkulu untuk mengembangkan usahanya. Namun, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap layanan ini masih menjadi tantangan besar. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap layanan keuangan mikro berbasis syariah di Bengkulu membatasi efektivitasnya dalam mendukung pemilik usaha kecil dan pengusaha.

Banyak calon penerima manfaat yang mungkin tidak sepenuhnya memahami cara kerja keuangan mikro Islam, atau mereka mungkin salah paham tentang prinsip dan manfaatnya.

Kurangnya pengetahuan menyebabkan kurangnya pemanfaatan sumber daya keuangan yang tersedia, sehingga menghambat usaha kecil mengakses modal yang mereka perlukan untuk tumbuh dan menciptakan lapangan kerja. Untuk mengatasi tantangan ini, penting untuk meluncurkan inisiatif pendidikan dan program sosialisasi yang menjelaskan konsep pembiayaan syariah, kelebihanannya, dan proses penerapannya. Dengan meningkatkan kesadaran dan menumbuhkan kepercayaan terhadap layanan-layanan ini, lebih banyak pengusaha akan terdorong untuk memanfaatkan keuangan mikro syariah, yang pada akhirnya dapat memperkuat perekonomian lokal dan mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan (Purwanto et al., 2021).

KESIMPULAN

Keuangan sosial syariah mempunyai potensi besar untuk memperkuat ketahanan perekonomian masyarakat di Bengkulu. Optimalisasi zakat, wakaf dan keuangan mikro syariah dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan ekonomi jika dikelola secara efektif. Untuk mencapai hasil yang maksimal, diperlukan upaya digitalisasi, penguatan kapasitas kelembagaan, dan kolaborasi aktif antara pemerintah, lembaga Islam, dan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan sosial Islam, namun juga memperluas cakupan manfaat bagi masyarakat yang menggunakannya.

Selain strategi-strategi yang disebutkan di atas, penting untuk menekankan perlunya kerangka peraturan yang kuat untuk mengatur mekanisme keuangan sosial Islam di Bengkulu. Pedoman dan peraturan yang jelas dapat membantu memastikan transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan dana yang tepat, sehingga akan membangun kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi yang lebih besar. Selain itu, menumbuhkan budaya memberi, dimana masyarakat secara aktif terlibat dalam zakat, wakaf, dan keuangan mikro, sangat penting untuk keberlanjutan jangka panjang dari inisiatif-inisiatif ini.

Kampanye pendidikan dan kesadaran, baik di perkotaan maupun pedesaan, harus

diprioritaskan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat dan dampak keuangan sosial Islam. Selain itu, keterlibatan pemangku kepentingan lokal, termasuk tokoh masyarakat dan dunia usaha, merupakan kunci dalam menyesuaikan solusi keuangan sosial Islam dengan kebutuhan spesifik setiap daerah di Bengkulu. Dengan mengidentifikasi tantangan-tantangan lokal dan memanfaatkan sumber daya lokal, inisiatif-inisiatif ini dapat diintegrasikan secara lebih efektif ke dalam struktur masyarakat, sehingga memastikan bahwa manfaat ekonomi didistribusikan secara luas dan berkelanjutan.

Kesimpulannya, meskipun keuangan sosial Islam merupakan alat yang ampuh untuk transformasi ekonomi, keberhasilan penerapannya di Bengkulu memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multi-aspek yang mencakup manajemen yang efektif, keterlibatan publik, kerangka kelembagaan yang kuat, dan kolaborasi lokal. Jika elemen-elemen ini ditangani secara memadai, keuangan sosial Islam dapat memainkan peran transformatif dalam mengurangi kemiskinan, menjembatani kesenjangan ekonomi, dan mendorong pembangunan masyarakat berkelanjutan di Bengkulu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya dalam melaksanakan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., Shulhoni, M., & Achmad, D. (2023). Islamic social finance in Indonesia: Opportunities, challenges, and its role in empowering society. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 2(1), 45–62. <https://doi.org/10.20885/risfe.vol2.iss1.art4>
- Gustang, A. (2020). Kemiskinan, Kesenjangan dan PDRB Perkapita di Sulawesi Selatan. *Majalah Media Perencana*, 1(1), 62–81. <https://mediaperencana.perencanapembangunan.or.id/index.php/mmp/article/download/4/4/>
- Maulida, S., Aderemi, A., Maikabara, A. A.,

- Anward, R. J., Fasa, M. I., Pambuko, Z. B., & Purwanto, P. (2020). The Role of Islamic Social Finance Institution to Building Halal Industry. *Kresna Social Science and Humanities Research*, 1(Figure 1), 1–4. <https://doi.org/10.30874/ksshr.13>
- Purwanto, P., Sari, F. N., Burasukma, M., & Nursolihah, S. (2021). The Role of Islamic Social Finance Through Ziswaf and BMT During The Covid-19 Pandemic. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(2), 81. <https://doi.org/10.21043/malia.v5i2.11911>
- Sulistyaningsih, S., & Ivan, M. (2021). Konsep Resiliensi dan Ketangguhan Dalam Perencanaan Kebijakan Sosial. *Jurnal JISPOL*, 5(3), 1–22.
- Yetty, Amin, C., & Waibot, Z. (2021). Peran Konektivitas Dalam Pembangunan Ekonomi Kepulauan Provinsi Maluku Utara. *JFRES: Journal of Fiscal and Regional Economy Studies*, 4(1), 50–60. <https://doi.org/10.36883/jfres.v4i1.53>